

## **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Dila Aurelia<sup>1)</sup>, Rismawati Sudirman<sup>2)\*</sup>, Hapid<sup>3)</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Email: nadila.dm.dc@gmail.com<sup>1</sup>; risma11@umpalopo.ac.id<sup>2\*</sup>; hapid.umpalopo@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kajian empiris Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** kompetensi aparatur pengelola dana desa; partisipasi komunitas; akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### ***The Influence of Village Apparatus Competence, Community Participation, on the Accountability of Village Fund Management.***

#### ***Abstract***

*This study aims to determine the competency of village fund management apparatus, community participation, and accountability for managing village funds. Empirical study of Village Government Apparatuses in Ponrang District, Luwu Regency. The population in this examine is village authorities apparatus, Ponrang District, Luwu Regency. The sampling method used random sampling. strategies of records evaluation using more than one linear regression evaluation. The consequences of this observe are the competency of village fund management apparatus, community participation, and feature a high quality and significant effect on the responsibility of village fund management.*

**Keywords:** *competencies of village fund management apparatus; community participation; and the internal control system; accountability of village fund management.*

### **Pendahuluan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ponrang Kab. Luwu. Populasi dari penelitian ini adalah pengelola dana desa di Kecamatan Ponrang, terdiri atas: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara, dan Unsur Kaur.

Pertumbuhan akuntansi sektor publik di Indonesia, semakin berkembang pada era reformasi melalui pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, beserta desentralisasi fiskal yg mengutamakan pemda. Daya saing disetiap negara dipengaruhi oleh pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap pembeda, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan bisa tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. UU No.33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat serta wilayah mewujudkan pembaruan akuntansi keuangan daerah serta manajemen keuangan daerah banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik pemda atas pengelolaan keuangan publik (Putra & Rasmini, 2019).

Disahkannya Undang-Undang angka 6 Tahun 2014 perihal Desa kemudian ditindaklanjuti menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari jumlah Pendapatan dan Belanja Negara menggunakan dana desa dan menerima prioritas pembangunan nasional. Undang-undang desa bertujuan supaya desa semakin berdaya pada program serta aktivitas pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai prioritas pembangunan pemerintah sesuai dengan Nawa Cita pemerintah yaitu setiap desa pinggiran akan dilakukan peningkatan pembangunan (Arfiansyah, 2020).

Tahun 2015 sampai 2019. Rinciannya Rp 20, 67 triliun (2015), Rp 46, 98 triliun Perihal ini pastinya akan berakibat positif demi kemajuan desa itu sendiri, pemerintah telah mengantarkan keyakinan penuh terhadap desa dengan membagikan alokasi berbentuk dana desa untuk menunjang sistem penyelenggaraan yang terdapat pada desa. Perihal ini dibutuhkan agar desa mampu membangun desanya sendiri dengan berdaya selaku dampaknya dapat membangun landasan yang kokoh agar terbentuk desa yang mandiri dan sejahtera serta menciptakan kesejahteraan disetiap warga desa. Anggaran desa ini pertama kali di laksanakan di Indonesia dimulai pada tahun 2015. anugerah anggaran desa ini dilaksanakan secara berkala oleh pemerintah pusat, bantuan anggaran desa ini bersumber eksklusif berasal dari aturan Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN).

Dengan adanya bantuan anggaran desa tersebut pemerintah berharap desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Arfiansyah, 2020). Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020- 2024 dalam membangun desa mandiri alokasi anggaran nasional buat dana desa sebesar Rp 400 Triliun sepanjang 5 tahun kedepan sampai 2024. Tiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan hadapi kenaikan. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun sepanjang 5 tahun tidak sempat hadapi penyusutan tiap tahunnya semenjak tahun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), serta Rp 70 triliun (2019) (Arfiansyah, 2020). Tahun 2018 batal naik sebab hadapi sebagian perkara antara lain rawan dikorupsi. Bagi Indonesia (Arfiansyah, 2020) kalau korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, ialah salah satu problem mendasar. Problem ini timbul sebab implementasi pengelolaan anggaran di tingkat desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas.

Ada keterlambatan serta rendahnya penarikan dana desa dari kabupaten/ kota ke desa, dalam penilaian penyaluran serta pemakaian dana desa tahun 2015. Mengenai pemakaian dana desa, terdapat pemakaian dana desa tertentu yang diprioritaskan, seluruh pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pengadaan ini menyebabkan informasi yang tidak bisa digunakan ataupun dimanfaatkan, penggunaan dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, serta kelebihan volume RAB. (Mada et al., 2017). Hasil evaluasi pemakaian dana desa

semester satu, tahun 2016 masih mengalami konflik. kasus tersebut antara lain: pemakaian dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung memakai fakta yang mencukupi, pekerjaan konstruksi dicoba sepenuhnya oleh pihak ketiga/ penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan serta penyeteroran pajak tidak cocok, dana ditaruh bukan pada RKD, dan pengeluaran diluar APBDesa (Mada et al., 2017).

Pengelolaan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kesetiap daerah merupakan tugas dari aparatur desa, agar pembangunan desa menjadi lebih baik, transparan, serta akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan atau dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini menampilkan tanggungjawab serta keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pula bisa menampilkan bahwa aparatur desa sudah bekerja dengan benar, etis serta bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas jadi tolak ukur untuk aparatur desa atas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka (Pahlawan et al., 2020). Kompetensi yang dipunyai aparatur desa pula jadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik serta akuntabel karena aparatur desa yang berkompeten serta mempunyai keahlian dalam mengelola dana desa hendak gampang melaksanakan tugasnya.

Banyaknya program kerja desa menimbulkan para aparatur desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur desa melakukan pengelolaan dana desa yang baik. (Indraswari & Rahayu, 2021) menyatakan jika partisipasi masyarakat desa yaitu keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut hendak berakibat pada proses penilaian serta kontrol kinerja pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membagikan masukan maupun kritikan perihal penataan serta pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atas pengelolaan dana serta dapat mengurangi pemakaian ataupun pemanfaatan dana yang tidak pas sasaran.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dan menyebarkan 100 kuesioner di 10 desa di kec Ponrang, dan yang kembali ada 86 kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah pengelola dana desa di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, terdiri atas: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara, dan Unsur Kaur. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Kompetensi aparatur (X1) partisipasi masyarakat (X2) terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

**Hasil dan Pembahasan**

Tabel 1. Uji signifikan variabel (Uji Statistis T)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.453	2.260		5.068	.000

	Aparatur pengelolaan dana desa	.030	.066	.046	.448	.655
	Partisipasi masyarakat	.385	.107	.370	3.610	.001
a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan dana desa						

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan hasil analisis Tabel 1, membuktikan bahwa aparatur pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,655 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,448. Nilai signifikansi 0,655 lebih besar dari 0,05 ( $0,655 > 0,05$ ) mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak memberikan pengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.610. Nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 5 persen atau 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Table 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.379 <sup>a</sup>	.143	.123	2.10314
a. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat, Aparatur pengelolaan dana desa				

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan pada Tabel 2, hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) memberikan nilai R-squared sebesar 0,143. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variable independen sebesar 14,3% sedangkan sisanya 85,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

**Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.432	2	30.716	6.944	.002 <sup>b</sup>
	Residual	367.126	83	4.423		
	Total	428.558	85			

- a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan dana desa  
 b. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat, Aparatur pengelolaan dana desa

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 5 persen ( $0,000 < 0,05$ ). Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini data yang diperoleh diolah menggunakan model regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.453	2.260		5.068	.000
	Aparatur pengelolaan dana desa	.030	.066	.046	.448	.655
	Partisipasi masyarakat	.385	.107	.370	3.610	.001

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan nilai konstanta sebesar 11,458 dan nilai koefisien untuk variabel aparatur pengelolaan dana desa adalah 0,030 dan variabel partisipasi masyarakat adalah 0,385 maka persamaan regresi linear adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 11,453 + 0,030 + 0,385 + e$$

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan tabel 1, variabel Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa( X1) tidak mempengaruhi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa( Y). Hasil studi ini menunjukkan kalau pengaruh kompetensi aparatur desa tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dari itu hipotesis 1 dalam riset ini ditolak. Hasil riset ini menunjukkan sedikitnya kompetensi aparatur desa dalam mengelolah keuangan desa. Ini disebabkan oleh sedikitnya kemampuan aparat desa dalam penggunaan teknologi, kurangnya pengetahuan tentang sistem pengelolaan dana desa serta masih sedikitnya training teknis akuntansi, sebagai akibatnya kurang optimalnya penyusunan pelaporan realisasi anggaran. Pemerintah desa tak melaksanakan kegiatan pembinaan sebagai penyebab kompetensi aparatur ini kurang maksimal. Kompetensi aparatur pemerintah desa masih pada kategori sangat buruk dalam mengelola dana desa yang terbilang lumayan besar,

oleh karena itu pemerintah desa telah menyiapkan sistem yang mempermudah aparat desa dalam membuat laporan keuangan jadi akuntabel tanpa harus memikirkan tingkatan kompetensi (Sari & Padnyawati, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori perkembangan evolusioner yang dikemukakan oleh Jansen dan Mecking (1976) konsisten dengan gagasan bahwa hubungan antara agen dan prinsip dapat menghasilkan simetri informasi. Kompetensi aparatur desa yang baik adalah bagaimana cara pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu dengan mengarahkan semua keahlian dan kemampuan aparatur desa yang dimiliki. Di Desa Se-Kecamatan Ponrang tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurangnya keahlian aparatur desa ini tidak membantu perangkat desa dalam meminimalisir adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walyati & Farida, 2020) dan (Sahala Purba et al., 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 1 yaitu variabel pengaruh partisipasi masyarakat (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Agrawal dan Ribot (1999:477) yang menyatakan bahwa setiap model akuntabilitas merupakan hubungan simbiosis, hasil penelitian ini sepenuhnya konsisten dengan prinsip akuntabilitas. Di permukaan, ada aktor (Pemerintah) dan legislator (masyarakat). Agar pemerintah tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat seharusnya datang meminta pertanggungjawaban pemerintah. Konsekuensinya, kegiatan desentralisasi akan lebih terprediksi. Mirip dengan Los Angeles, partisipasi adalah strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Sebagian masyarakat yang menyalahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Bukti studi dari Amerika Serikat dan Korea Selatan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dapat menyebabkan tata pemerintah yang lebih baik, karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat, dapat membuat pemerintah dan pejabat publik lebih bertanggung jawab. (Mada et al., 2017)

Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian (Umaira & Adnan, 2019) bahwa semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Atiningsih & Ningtyas, 2019) mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu semakin besar partisipasi masyarakat dalam pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan melalui pengujian hipotesis, dapat dikemukakan pernyataan sebagai berikut: Kompetensi aparatur desa (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya keahlian penggunaan teknologi oleh aparat desa, pengetahuan yang kurang baik dalam melaksanakan sistem menimpa pengelolaan dana desa serta masih minimnya pemahaman teknis akuntansi dengan baik, sehingga dalam penataan serta pelaporan realisasi anggaran dana desa masih kurang maksimal. tak terlaksananya kegiatan pembinaan pula jadi alibi kompetensi aparatur ini kurang optimal. hasil riset ini tidak berubah-ubah menggunakan riset yg dicoba oleh Walyati( 2020) dan Widyatama (2017) yang melaporkan jikalau kompetensi aparat pengelola

dana desa tidak memiliki dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu: Penelitian juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel wilayah agar bukti empiris dapat digeneralisasikan pada wilayah lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam memperoleh informasi data dalam penelitian dan dapat melakukan wawancara secara langsung dan jelas dengan responden agar memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai pengelolaan dana desa. Penelitian ini sangat menyarankan untuk penelitian selanjutnya jika menggunakan variabel partisipasi masyarakat lebih baik memberikan kuesioner langsung kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015-2019
- Atiningsih, S., Ningtyas, A. C. (2019).
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam

- Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota Jambi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>
- Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 21, 544–562.
- Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo) Tarjo 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bun. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 5(2), 1/16. <http://ejournalstiamataram.ac.id>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Undaan, K. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Walyati, F. N., & Farida. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Muntilan). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 270–285.